

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT DI SEKITAR DAERAH RENCANA PENAMBANGAN BATU BARA PT. GURUH PUTRA BERSAMA (GPB) DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

Oleh:
Warman

(Dosen Jurusan IPS FKIP-Unmul)

ABSTRACT

Coal mining Plan of PT. Guruh Putra Besama (GPB) in Kutai Kartanegara, except positive impact also have negative impact to social cultural and economic condition of around society. From the result of the research has been known that society economic rate in general was good enough, or out from property line.

The area occupied on average 3.25 ha per head of the family. Local economic activities are still focused on the fulfillment of basic needs, although the paper has sufficient economy. Tradition that dominant is Kutai. Cultural values such as negative liquor, prostitution, lottery (coupon white) and the issue of drugs, does not exist in the region. Social conflict was occurred, triggered by air pollution and waste management by PT. Indonesian Pratama considered less professional. The assimilation process still rare among them, existing social institutions and function well among others, RT, KUD, and Posyandu. Public perception of the plan of mining coal is very positive, because it will provide benefits for them.

Keywords: *Social Economy, Social Cultural*

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Otonomi Daerah 1999).

Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), yang pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Warman adalah staf pengajar FKIP Univ. Mulawarman, Samarinda

PT. Guruh Putra Bersama (selanjutnya disebut PT. GPB), adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan luas wilayah KP Eksplorasi 4.008 ha, secara administrasi termasuk dalam wilayah desa Gunung Sari Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara. Selain menimbulkan dampak positif, rencana kegiatan penambangan batubara oleh PT. GPB diperkirakan juga akan menimbulkan dampak negatif, yaitu : (1) kegiatan pembebasan lahan diperkirakan akan menimbulkan dampak negative terhadap hilangnya matapencaharian dan pendapatan penduduk yang terkena pembebasan lahan, serta memicu terjadinya konflik social bila dalam pelaksanaan ganti rugi tidak mencapai kata mufakat, (2) aktivitas mobilisasi peralatan pada tahap konstruksi diperkirakan akan menimbulkan dampak negative terhadap sarana fasilitas masyarakat, terjadinya kecelakaan lalu lintas darat dan lalu lintas sungai; (3) kegiatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahap pasca operasi tambang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, perekonomian lokal, dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa dampak negatif dari suatu proyek yang direncanakan harus diminimasi sekecil mungkin, agar kegiatan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan kualitas lingkungan hidup di sekitar proyek yang direncanakan tidak menurun. Untuk meminimasi dampak negative tersebut perlu dilakukan studi dengan tujuan mendapatkan data (rona awal) tentang: (1) kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, (2) gambaran tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat dan (3) mencoba menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan rencana kegiatan penambangan batu bara oleh PT. GPB guna mengelola kemungkinan timbulnya dampak. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah setempat dan pihak pemrakarsa, guna meminimasi dampak negatif yang diakibatkan kegiatan penambangan batubara.

II. Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan, yaitu kepala suku, tokoh agama, kepala desa, pemuka adat, sesepuh desa dan aparat pemerintah yang terkait.. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak pemrakarsa dan instansi-instansi lain yang terkait seperti Dinas Pertambangan, Bappeda, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa di sekitar lokasi studi.

Komponen sosial ekonomi yang akan diteliti adalah : (1) ekonomi rumah tangga (meliputi: tingkat pendapatan per kapita dan pola nafkah ganda), (2) ekonomi sumberdaya alam (meliputi: pola pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya alam, cara masyarakat dalam memperoleh lahan, sumberdaya alam milik umum) (3) perekonomian lokal dan regional, (meliputi: jenis dan jumlah aktivitas perekonomian non formal, fasilitas umum dan fasilitas social, aksesibilitas wilayah, (4) penyerapan

tenaga kerja. Sedangkan komponen sosial budaya meliputi : (1) adat istiadat/norma budaya serta (2) persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana penambangan batu bara.

Selain data sekunder, data primer diperoleh melalui survai sampel/wawancara dengan responden sebanyak 10% dari jumlah kepala keluarga yang terdapat di desa, yang ditetapkan berdasarkan stratifikasi sosial yang diperkirakan akan mendapatkan dampak negatif maupun dampak positif dari kegiatan.

Data yang terkumpul untuk komponen sosial budaya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sosial ekonomi ditabulasikan dan dianalisis dengan rumus sebagai berikut :

1) Tingkat Pendapatan

- (a) Tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator ekonomi rumah-tangga dianalisis dari sisi penerimaan :

$$I = TR \quad \dots 5)$$

Keterangan :

I = Pendapatan (*Income*)

TR = Total penerimaan (*Total Revenue*)

- (b) Tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator ekonomi rumah-tangga dianalisis dari sisi pengeluaran :

$$I = c - i + s \quad \dots 6)$$

Keterangan :

I = Pendapatan (*income*)

c = Konsumsi (*consumption*)

i = Investasi (*investment*)

s = Tabungan (*saving*)

2) Rata-rata Pendapatan /Pendapatan perkapita (Y)

$$Y = \frac{Y}{A} \quad \dots 7)$$

Keterangan :

Y = Total pendapatan

A = Jumlah tanggungan keluarga

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Sosial Ekonomi

3.1.1. Ekonomi rumah tangga

Pada level ekonomi rumah tangga berdasarkan data hasil survei sampel dapat diketahui rata-rata tingkat pendapatan per bulan/rumah-tangga dilihat dari sisi penerimaan adalah Rp. 2.407.500,- atau Rp. 6.419.000/kapita/tahun

Dengan asumsi bahwa harga beras di wilayah studi sebesar Rp. 6.500,- per kg, maka pendapatan tersebut setara dengan 987,54 kg beras per kapita per tahun. Berdasarkan kriteria Sayogyo (1977), pendapatan ini berada di atas garis kemiskinan, karena masih di atas 320 kg per kapita per tahun. Artinya, untuk level ekonomi rumah tangga, secara umum penduduk di wilayah studi pada tahun 2007 tidak tergolong miskin.

Pendapatan terendah adalah Rp. 600.000,- (pendapatan seorang petani ladang tanpa usaha sampingan, berpendidikan tamat SD). Sedangkan pendapatan yang tertinggi Rp. 16.000.000,- (pendapatan seorang pengusaha Jasa Transportasi yang memiliki 8 unit Dam Truk yang beroperasi di PT. Rea kaltim).

Mengenai pola nafkah ganda, penduduk pada umumnya selain pekerjaan pokok, mereka juga memiliki beberapa sumber pendapatan yang merupakan pekerjaan sampingan seperti usaha warung sembako (20%), jasa transportasi darat (10%), bertani kebun (70%), mencari ikan (20%), jualan/ kedai minum (15%), dan bekerja serabutan (30%).

3.1.2. Ekonomi sumberdaya alam

Berdasarkan potensi daerah di Desa wilayah studi, sumber daya alam yang cukup potensial adalah di bidang pertanian yang hingga saat ini masih tetap dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang. .

Hasil survey sampel menunjukkan bahwa pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang dikuasai oleh penduduk rata-rata 3,25 Ha per kepala keluarga. Kepala keluarga yang memiliki dan menguasai sumber daya alam terluas adalah 8 ha, dan yang paling sempit 1 ha. Dari rata-rata lahan yang dimiliki, sebagian besar digarap sebagai kebun buah-buahan, dan kebun kelapa sawit. Selebihnya dijadikan lahan garapan pertanian (ladang berpindah).

Mengenai lahan yang di kuasai pada umumnya diperoleh dengan cara membuka hutan sendiri (55%), pembagian desa/tanah adat (20%), warisan orang tua (10%), dan ada pula yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain (5%).

Sumber daya alam milik umum berupa hutan belukar, yang peruntukannya terbuka bagi siapa saja, terutama bagi masyarakat asli Desa Gunung Sari.

Data survei sampel menggambarkan bahwa pola pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam pada dasarnya adalah milik pemerintah dan pribadi. Pemerintah yang dimaksud terutama adalah pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan pribadi, yang dimaksud adalah penduduk setempat. Sumberdaya alam yang dikuasai oleh pemerintah umumnya adalah sumberdaya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, misalnya lahan hutan yang mengandung batubara. Walau dikuasai oleh pemerintah, namun sesuai dengan sifatnya, hutan terbuka bagi masyarakat setempat yang bermaksud memanfaatkannya. Bagi usaha skala besar (formal) harus meminta izin kepada pemerintah, sedang bagi usaha informal (misalnya mencari kayu bakar) tidak diperlukan izin. Sedangkan sumberdaya alam yang boleh dikuasai dan dimiliki oleh pribadi terutama adalah lahan.

Perekonomian lokal dan regional

Mengenai jenis dan jumlah aktivitas perekonomian non formal yang merupakan salah satu indikator perekonomian lokal dan regional yang terdapat di wilayah studi adalah berupa toko/warung sembako sebanyak 9 (sembilan) warung/toko/kios, dan biro perjalanan sebanyak 1 (satu) biro perjalanan.

Salah satu prakondisi dapat berkembangnya suatu daerah, adalah tersedianya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi, karena dengan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi akan dapat memperlancar segala macam aktivitas ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil survei sampel tergambar bahwa prasarana perekonomian di wilayah studi sudah cukup memadai, terutama pada akses jalan dan alat transportasi yang menghubungkan antara Desa Gunung Sari dengan desa-desa di sekitar areal Rea Kaltim yang berbatasan dengan KP. PT. GPB. Kondisi jalan tanah sepanjang 4 km dan lebar 6 meter dengan keadaan baik (50%) dan rusak (50%), jalan berbatu panjang 4 km, lebar 6 meter, keadaan baik (50%), dan rusak (50%), dan jalan semen sepanjang 800 meter, lebar 2 meter keadaan baik (100%).

Mengenai sarana angkutan darat yang ada di wilayah studi adalah mobil pribadi sebanyak 8 unit, truk 14 unit, sepeda motor 50 unit. Sedangkan sarana komunikasi menurut jenis dan jumlah pemilik yang ada di wilayah studi adalah pemilik Hp. Sebanyak 105 orang, pemilik pesawat TV 135 orang, pemilik radio 27 orang, dan pemilik antenna parabola sebanyak 122 orang.

Aksesibilitas wilayah studi (Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang) berjarak \pm 286 km dari ibukota Kabupaten Kutai Kertanegara, yang dapat dicapai dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur sungai dengan menggunakan kendaraan *Spit Boat* dari kota Bangun ke lokasi dengan waktu tempuh antara 3 sampai 4 jam. Untuk jalur darat, dengan menggunakan kendaraan roda empat dari

Tenggarong ke dermaga Kota Bangun lalu naik *long boat* ke Kahala dengan waktu tempuh \pm 2 jam, yang dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda 4 ke desa Gunung Sari dengan waktu tempuh \pm 2 jam.

3.1.4. Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak kehadiran suatu rencana usaha, diharapkan salah satunya dapat mengurangi pengangguran dengan menarik tenaga kerja masyarakat lokal di daerah tersebut. Dari informasi yang diperoleh pada saat kegiatan sosialisasi, pihak PT. GPB akan merekrut tenaga kerja lebih 60% dari masyarakat lokal. Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan penambangan batubara oleh PT. GPB pada tahap konstruksi dan tahap operasi berjumlah 505 orang. Pada tahap konstruksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 80 orang dan pada tahap operasi sebanyak 425 orang.

Untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang diinginkan maka dilakukan penerimaan dengan prioritas tenaga kerja lokal, yang memenuhi kualifikasi dalam kemampuan teknis / keterampilan dan skill dengan perbandingan 60% tenaga kerja lokal dan 40% tenaga kerja pendatang. Sehingga tenaga kerja dari daerah sekitar penambangan yang dapat ditampung diperkirakan berjumlah 203 orang dan selebihnya 202 orang dari luar daerah dan rekrutmen tenaga kerja ini akan disesuaikan dengan perkembangan penambangan di lapangan. Hal ini menunjukkan keberadaan PT. Guruh Putra Bersama telah memberikan dampak positif pada masalah tenaga kerja daerah, yang dengan sendirinya untuk tahap operasional akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap dan ini akan membantu perkembangan ekonomi daerah.

3.2. Kondisi Sosial Budaya

3.2.1. Adat-istiadat dan norma budaya

Adat istiadat yang berlaku di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang adalah adat suku Kutai, Jawa, Bugis dan ada sebagian kecil dari adat suku Timor. Keberadaan lembaga adat di desa wilayah studi sudah mulai pudar, dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama.

Karena sebagian besar penduduk di lokasi penelitian beragama Islam, maka kehidupan mereka juga ditandai oleh norma dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam, seperti saling tolong, gotong-royong, dan pembatasan hubungan muda-mudi sebelum menikah secara tegas. Bentuk-bentuk gotong royong yang terlihat masih melembaga terutama dalam menjaga kebersihan dan ketertiban desa.

Meskipun di sekitar lokasi penelitian sudah ada beberapa aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan, namun nilai-nilai negatif seperti (1) minuman keras, (2) pelacuran, (3) lotre (kupon putih), dan (3) isu obat-obatan terlarang, tidak terdapat di daerah penelitian.

3.2.2. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana penambangan batubara

Pada umumnya responden (100%) telah mengetahui akan keberadaan PT. GPB. Mereka mengaku mengetahuinya dari pihak perusahaan, perangkat desa dan pada saat sosialisasi. Hal ini menggambarkan bahwa proses sosialisasi tentang keberadaan PT, GPB telah diketahui oleh warga masyarakat. Sebagian besar responden (90%) menyatakan “sangat setuju” dan tidak ada responden yang “tidak setuju”, dan hanya 10% responden yang menyatakan “tidak tahu” dan “ragu-ragu”.

Alasan utama yang mereka kemukakan adalah bahwa proyek tersebut akan “memberikan kesempatan kerja” (90%), “kesempatan berusaha” (75%), “meningkatkan pendapatan” (75%), “ada akses jalan” (75%), dapat membantu pembangunan daerah (50%) dan alasan terbukanya daerah (50%).

Bagi beberapa responden yang menyatakan tidak tahu/ragu pada umumnya mereka menganggap kehadiran perusahaan di daerah ini akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran limbah, dan kemungkinan akan meningkatkan potensi konflik.

Sedangkan tanggapan responden jika lahan mereka akan terkena daerah operasional perusahaan terungkap, bila lahan mereka terkena daerah operasional perusahaan pada umumnya (80%) mereka menghendaki adanya ganti rugi lahan dengan harga yang telah disepakati bersama antara warga pemilik lahan dengan pihak perusahaan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan kedua belah pihak. Sementara itu sebagian kecil dari mereka (20%) lainnya tidak memberikan jawaban.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Rata-rata kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat cukup baik (tidak tergolong miskin), tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang punya tabungan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Pada umumnya penduduk mempunyai pola nafkah ganda, seperti usaha warung sembako, jasa transportasi darat, bertani kebun, mencari ikan, usaha kedai/minuman, dan bekerja serabutan. Anggota keluarga yang membantu mencari nafkah adalah anak dan anggota keluarga lainnya.

- 2) Status lahan yang dikuasai penduduk pada umumnya tidak disertai surat bukti apapun. Pola pemanfaatan sumberdaya alam adalah untuk mendirikan rumah, sebagai sarana transportasi dan sumber mencari nafkah. Cara masyarakat dalam memperoleh lahan pada umumnya diperoleh dengan cara membuka hutan sendiri, pembagian desa/tanah adapt, warisan orang tua, dan ada pula yang membeli dari orang lain (pihak pertama).
- 3) Kegiatan perekonomian lokal masih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk dan lain sebagainya, dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sendiri. Sarana dan prasarana perekonomian cukup memadai. Jenis kendaraan yang ada di daerah penelitian adalah mobil pribadi, Truk, dan Sepeda motor serta perahu bermotor. Sarana komunikasi yang terdapat di wilayah studi adalah Hand Pong (Hp), TV, Radio dan antena parabola. Aksesibilitas wilayah cukup memadai, yang dapat ditempuh baik melalui transportasi darat maupun sungai. Kehadiran PT. GPB diharapkan dapat berdampak positif seperti: mengurangi angka pengangguran, adanya peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Adat istiadat yang berlaku di lokasi penelitian adalah adat suku Kutai, Jawa, Bugis, dan ada sebagian kecil adat suku Timor. . Sebagian besar penduduk beragama Islam, sehingga kehidupan mereka juga ditandai oleh norma dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai-nilai budaya negatif, seperti minuman keras, pelacuran, lotre (kupon putih), dan issue obat-obatan terlarang, tidak terdapat di daerah ini..
- 5) Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan penambangan batubara oleh PT. GPB adalah sangat positif. Masyarakat menilai bahwa keberadaan proyek tersebut akan memberikan manfaat bagi mereka. Mereka berharap agar rencana penambangan batubara di daerahnya segera terealisasi.

4.2. Saran-saran

- 1) Rencana kegiatan penambangan batu bara oleh PT. GPB di Kabupaten Kutai Kertanegara, selain berdampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitarnya termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Untuk itu dalam penanganan dampak akan lebih tepat bila dilakukan terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya dampak, seperti kegiatan pembebasan lahan, mobilitas peralatan, rekrutman tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja pada tahap pasca tambang.
- 2) Kegiatan pembebasan lahan oleh PT. GPB diperkirakan akan menimbulkan dampak negative terhadap matapencaharian dan pendapatan penduduk yang terkena pembebasan lahan, untuk itu disarankan dalam proses pembebasan lahan perlu dilakukan musyawarah antara pihak pengusaha, pemerintah dan masyarakat (pemilik lahan) guna memperoleh kesepakatan bersama Selain itu perlu adanya pembinaan masyarakat ke arah profesi alternatif sejak dini,

- sehingga pada saat dampak negatif muncul masyarakat sudah siap untuk alih profesi yang dapat menopang kelangsungan hidupnya
- 3) Aktivitas mobilisasi peralatan pada tahap konstruksi diperkirakan akan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan sarana fasilitas masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pembatasan tonase muatan kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang ada, perlu pengamatan secara berkala terhadap kerusakan jalan dan segera memperbaiki sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah, dan pemasangan rambu-rambu pada setiap jalan yang rawan kecelakaan.
 - 4) Kegiatan penggalian, pengangkutan dan penimbunan batu bara diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap pencemaran air sungai sebagai sumber air bersih masyarakat dan meningkatkan kadar debu mengakibatkan timbulnya persepsi negatif masyarakat terhadap PT GPB yang dapat mengarah .pada terjadinya konflik sosial, oleh karena itu perlu menyediakan air bersih untuk warga masyarakat, penyiraman debu jalanan, pembuatan waduk untuk mengantisipasi sebelum air sungai tercemar, dan mengelola limbah sesuai aturan yang berlaku.
 - 5) Dalam proses penerimaan karyawan/buruh, hendaknya lebih memprioritaskan pada masyarakat setempat selama memenuhi spesifikasi keahlian yang dipersyaratkan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
 - 6) Pengusaha perlu menumbuhkan peran serta masyarakat pada kegiatan perdagangan, jasa angkutan, dan memberikan bantuan sosial, serta menindak tegas terhadap karyawan/buruh yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.
 - 7) Memberi uang pesangon sesuai peraturan, penyuluhan tentang pemanfaatan uang pesangon, dan memberi pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang akan di PHK agar bisa bekerja di sektor lain di kemudian hari. Dan dalam hal ini dapat bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga kerja setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1996. *Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Amdal*. Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 229 Tahun 1996.
- Huberman A. Michael dan Miles M.B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press. Jakarta.
- Sudharto P. Hadi. 1997. *Aspek Sosial Amdal (Sejarah, Teori dan Metode)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Sajogyo 1982. *Bunga Rampai Perekonomiaan Desa*. Yayasan Agro-ekonomi, IPB, Bogor.
- Sajogyo 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSP-IPB, Bogor.
- Sajogyo 1989. *Sosiologi Pedesaan*. Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 1989. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. UGM-Press, Yogyakarta.
- Tjitrajaya, I & A.P. Vayda. 1990. *Mangkaji Hubungan Timbal Balik antara Prilaku Manusia dan Lingkungan*. LIPI, Jakarta.
- Winardi. 1990. *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek Metodologisnya*. Rineka Cipta. Jakarta.